

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Koesomahatmadja, R.D.H, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 2009.
- Lubis, Irwansyah , *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Jogjakarta 2001.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Mudrajad, Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang "Ide Dasar Desentralisasi"*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktek Pemerintah dan Otonomi Daerah* , Grasindo, Jakarta, 2005.
- Nurmantau, Safri, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2003.
- Ratnawati, Tri, *Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia Pada Masa Perubahan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Riwu, Josef Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2005.
- Rozali, Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Siahaan, Marihot Pahala, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsudin, Haris, *Desentralisasi & otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005.
- Syaukani dkk, H, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Cet. VIII*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Winarna Surya, Adisubrata , *Otonomi Daerah Di Era Reformasi* , Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta , 2002.

Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Grafindo, . Jakarta, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Jurnal

Jurnal: IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SEBAGAI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)KABUPATEN BADUNG, PROPINSI BALI, di-download dari situs <https://ejournal.undip.ac.id/>

Buku Tahunan

Profil Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014, Pati, 2015

Profil Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015, Pati, 2016

Profil Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016, Pati, 2017

Internet

10 strategi dan upaya peningkatan pendapatan asli daerah, diakses dari <http://dppkad.patikab.go.id>, pada 14 Desember 2017

Hussein, Mohamad Zaki, *Fakta Singkat Pajak Indonesia*, diakses dari <http://inkrispena.org/fakta-singkat-pajak-indonesia/>, pada 22 November 2017.

Makalah Pajak Daerah, diakses dari www.slideshare.net, pada 20 Oktober 2017

Makalah pajak dan retribusi daerah, diakses dari <http://tulisantangkudi.blogspot.co.id> pada 20 Oktober 2017

Pendapatan Asli Daerah, diakses dari <https://www.academia.edu>, pada 10 September 2017

Perda nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah diakses dari <http://jdih.patikab.go.id> , pada 10 Desember 2017

Sumber dan penggunaan dana pada pemerintah daerah, diakses dari <https://andichairilfurqan.wordpress.com>, pada 20 September 2017

Tribun Jateng, Satpol PP pati tutup karaoke liar di desa Ngantru, diakses dari <http://jateng.tribunnews.com>, pada 25 September 2017